

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sering digunakan di dalam masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Banyaknya perusahaan yang menjalankan bisnisnya dibidang transportasi membuat perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang keras untuk dapat bertahan dalam pasar global, khususnya untuk perusahaan sub sektor transportasi yang ada di Indonesia.

Laporan keuangan yang lengkap berisi informasi laba yang memiliki peranan signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi laba sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistik manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya dalam memanipulasi laporan keuangan agar dapat menarik calon investor. Tindakan yang mementingkan kepentingan sendiri yang dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginannya yang biasa disebut manajemen laba.

Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yakni teori yang

menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*), konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. Manajemen laba dapat diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba.

Manajemen laba dalam perusahaan transportasi merupakan hal yang logis karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan, sementara sebagian pihak menilai manajemen laba merupakan intervensi yang dilakukan manajer sesuai dengan kerangka standar akuntansi. Dengan adanya aturan standar akuntansi keuangan tanpa menyesatkan pembacanya dengan tidak mengungkapkan seluruhnya akan berdampak positif kepada laporan keuangan yang sehat dalam perpajakannya maupun laba yang diperoleh sehingga para investor percaya untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Beberapa fenomena manajemen laba yang terjadi pada tahun 2019-2021 adalah salah satu perusahaan jasa yaitu Garuda Indonesia yang melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2018, masalah ini akhirnya di-

ketahui publik pada April 2019 karena tidak hanya mampu menutupi kerugian tahun sebelumnya, tetapi juga menghasilkan laba bersih sebesar Rp.11,33 miliar atau US\$ 809,84 ribu. Untung yang didapatkan perusahaan tersebut merupakan hasil polesan. Kejanggalaan pada laporan keuangan ini dimulai dengan perolehan laba bersih tahun 2018 karena adanya perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang bernilai Rp.3,41 triliun. Perusahaan ini seharusnya mengalami kerugian jika tidak ada pencatatan perolehan pemasukan dari perjanjian tersebut. Contoh yang terjadi pada tahun 2020 adalah adanya pandemi virus *Corona*. Banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan akibat pandemi tersebut, namun perusahaan dituntut untuk menyampaikan laporan keuangan yang baik untuk para investor.

Dalam manajemen laba, terdapat beberapa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi manajemen laba di antaranya:

Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal. Legal di sini, artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang (*loopholes*) sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Secara teoritis, *tax planning* merupakan upaya wajib pajak mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan. *Tax planning* dilakukan antara lain untuk tujuan memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak dan Bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Adanya perencanaan pajak diharapkan dapat menekan tingginya pajak yang ditanggung perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang sah di Indonesia. Tindakan perencanaan pajak ini selaras dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen akan berusaha melakukan tindakan opportunistik untuk mencapai kepentingan pribadi mereka. Dalam kondisi seperti ini diperlukan adanya pihak ketiga yang dianggap mampu menengahi dua kepentingan (*agent dan principal*) untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan kredibel dan terbebas dari kecurangan. Yaitu dengan adanya audit yang berkualitas. Kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat menekan terjadinya praktik manajemen laba pada suatu perusahaan.

Hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba adalah dengan adanya perencanaan pajak yang bagus maka perusahaan akan

cenderung melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah mengatur besarnya laba yang dilaporkan, sehingga mengindikasikan adanya praktik manajemen laba.

Pemerintah Indonesia menyemarakkan awal tahun 2019 dengan wacana kebijakan fiskal terbaru, berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan. Hal itu dianggap dapat mendongkrak daya saing Indonesia di hadapan ekonomi global. Terlebih, tarif PPh badan Indonesia yang sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak saat ini masih lebih tinggi dibanding negara-negara sesama penghuni Asia Tenggara. Hanya saja, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengaku tak ingin penurunan tarif yang dilakukan Indonesia ke depan berbuah menjadi ‘perang’ fiskal dengan negara – negara berkembang. “PPh badan ini membutuhkan perubahan UU yang butuh proses Panjang, bukan hanya sekedar Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan,” jelasnya.

Rusia pernah menurunkan tarif PPh badan dari 24 persen ke 20 persen pada 2009. Hanya saja, rasio pajak di Rusia itu turun dari 16 persen menjadi 13 persen terhadap PDB. Berkaca dari pengalaman, Indonesia ternyata mengalami hal yang sama. Penurunan tarif PPh badan dari 30 persen ke 25 persen pada tahun 2010 lalu nyatanya menggerus rasio pajak dari 13 persen menjadi hanya 10,9 persen. Namun, ada juga contoh sukses penurunan tarif PPh badan, seperti China. Penurunan tarif PPh badan di China itu turun dari 33 persen ke 25 persen. Hal itu justru mendongkrak rasio pajak dari 9,9 persen

menjadi 10,3 persen dari PDB.

Menurut Yustinus, tarif PPh memang perlu disesuaikan sebagai sinyal bahwa Indonesia siap menghadapi kompetensi penanaman modal dengan negara lain. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam membuat formulasi. Jangan sampai penurunan tarif PPh badan berbuah penurunan rasio pajak terhadap PDB dalam jangka pendek. “Dalam jangka menengah dan Panjang, penerimaan akan naik, tapi tetap hati-hati karena dasar pengenaan PPh ini kan laba,” jelas Yustinus.

Isu dalam penelitian ini adalah adanya motif perencanaan pajak yang digunakan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Terungkapnya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia membuktikan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak yang agresif dengan cara melakukan pembiayaan fiktif, transaksi ekspor fiktif, dan *transfer pricing* untuk merekayasa *omzet* (pendapatan) penjualan.

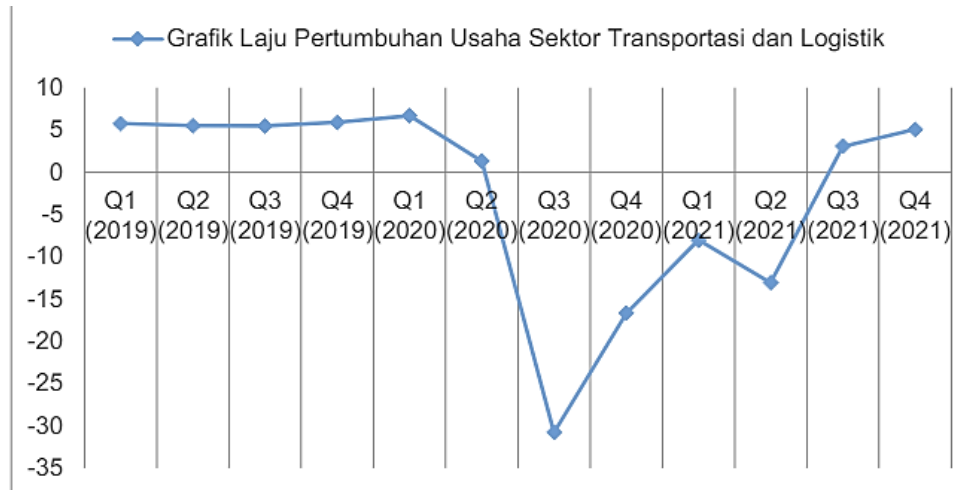
Faktor kedua yang dapat mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Menurut Basyaib (2007) ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal akan mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat. Semakin besar total aktiva maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang

besar cenderung lebih diperhatikan oleh pihak-pihak eksternal sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangannya.

Ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dapat dijelaskan dengan pendekatan *signaling theory* oleh Ross (1977). Besarnya perusahaan akan menunjukkan besarnya informasi yang terkandung di dalamnya, sehingga masyarakat memandang perusahaan besar lebih andal dalam menyajikan pelaporan keuangan. Selain itu menurut Nasution dan Setiawan (2007) perhatian yang lebih besar dari masyarakat mendorong perusahaan besar untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan pelaporan keuangan, berbeda dengan perusahaan kecil yang cenderung memperlihatkan kinerja perusahaan yang selalu baik agar investor menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Pada tahun 2019, awal terjadi pandemi covid-19 di Indonesia, pada perusahaan transportasi sempat mengalami *flutuasi* yang cenderung menurun karena terdapat kebijakan baru yang dirancang pemerintah yang berdampak pada aktivitas operasi dalam sektor transportasi. Adapun kebijakan yang diterapkan pemerintah, seperti PSBB dan PPKM yang menyebabkan penurunan mobilitas masyarakat dan menyebabkan omzet pada sektor transportasi menurun.

Gambar 1. 1 GRAFIK LAJU PERTUMBUHAN USAHA SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TAHUN 2019-2021



Pertumbuhan usaha pada sektor transportasi dan logistik mengalami penurunan drastis semenjak adanya pandemi Covid-19. Anjloknya Produk Domestik Bruto pada sebagian besar perusahaan sektor transportasi dan logistik menyebabkan indeks saham pada sektor ini mengalami penurunan drastis. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham dan pemiliknya. Hal ini mengindikasikan nilai perusahaan mengalami penurunan. Namun seiring berjalannya waktu pada awal tahun 2021 setelah kondisi semakin membaik, PDB sektor transportasi perlahan mengalami kenaikan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi manajemen laba adalah keputusan investasi. Menurut Mulyadi (2006), keputusan investasi adalah suatu keputusan melepaskan dana saat sekarang dengan harapan untuk menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal. Dengan keputusan investasi, berarti

memberi jawaban atas bidang usaha apa yang akan dimasuki, karena banyak alternatif investasi yang dapat dilaksanakan sehingga kekayaan pemilik diharapkan dapat bertambah.

Dalam melakukan investasi harus melalui proses penilaian yang tepat mengenai prediksi tingkat keuntungan dan risiko, karena investasi yang bermanfaat di masa yang akan datang diliputi oleh ketidakpastian, dalam konsep manajemen keuangan disebut risiko investasi. Pada awal Mei 2020, Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil membongkar investasi bodong beromzet Rp 28 miliar yang dilakukan oleh MB alias Adun yang merupakan Direktur Umum PT Asia Dinasti Sejahtera (ADS), dengan modus aplikasi investasi. Kapolda NTT menyampaikan bahwa kasus ini perlu di atensi dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati memilih kegiatan investasi, jangan mudah percaya karena tujuan dari pelaku adalah memberikan janji muluk dan masyarakat yang akan menjadi korban. Sehingga dalam melakukan investasi harus mengetahui pengetahuan keputusan investasi, karena semakin besar investasi yang dilakukan, maka risiko akan semakin tinggi.

Sebelum memutuskan untuk membeli saham tertentu, investor biasanya akan melihat satu parameter penting, yaitu mengukur keputusan investasi dengan rasio *Price to Earning Ratio* (PER). PER mencerminkan perbandingan antara harga saham dengan pendapatan per lembar saham. Bagi para investor, semakin tinggi PER maka pertumbuhan laba yang diharapkan akan mengalami

kenaikan.

Faktor keempat yang bisa mempengaruhi manajemen laba adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Nor Hadi (2018), Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* perusahaan merupakan bentuk upaya sistematis oleh perusahaan secara proaktif, terstruktur, dan berkesinambungan mewujudkan *business operation* yang dapat diterima secara sosial dan ramah lingkungan guna mencapai kesuksesan finansial, sehingga dapat memberikan *value added* bagi stakeholder.

Kegiatan CSR ini merupakan kewajiban perusahaan yang diatur dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan memperoleh manfaat berupa citra positif dari masyarakat maupun investor. Citra positif dari kegiatan dan pelaporan CSR tersebut dapat menjadi peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba karena secara tidak langsung investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya telah memberikan penilaian yang baik pada perusahaan.

Era new normal dimaknai oleh perusahaan sebagai upaya untuk beradaptasi dengan lingkungan tetapi dengan melakukan pencegahan sehingga terjadi yang namanya kekebalan kelompok (*Herd Immunity*). Salah satu perusahaan yang melakukan adaptasi kebiasaan baru yaitu PT. Grab Indonesia,

perusahaan transportasi *online*. Perusahaan PT. Grab Indonesia digandeng oleh Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan vaksinasi dengan pendekatan teknologi di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagaimana pandemi Covid-19 telah memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia selama lebih dari satu tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah terus berjibaku untuk bangkit, termasuk dalam memulihkan perekonomian nasional. Salah satu elemen penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional adalah menjalankan program vaksinasi. Program yang dimulai pada Januari 2021 itu menjadi garis pertahanan terdepan dalam melawan virus *Corona*. Demi menyukseskan dan mempercepat program vaksinasi, pemerintah pun berkolaborasi dengan pihak swasta, seperti Grab Indonesia.

Arya Sinulingga (2019), selaku Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menemukan penyalahgunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Garuda Indonesia. PKBL sering juga disebut dengan upaya perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penyalahgunaan tersebut didapat dari bukti transfer. Transfer terjadi dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kepada Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) sebesar Rp 50 juta. Dana itu diatasmakan sebagai bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Garuda Indonesia. Dalam bukti transaksi tertulis tujuan pengiriman dana untuk pemilihan umum 2019 IKAGI. Staf Khusus

Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan dana PKBL atau CSR seharusnya digunakan untuk kegiatan eksternal, bukan internal seperti pemilihan umum 2019 IKAGI. Dana CSR itu kan ditempatkan untuk kegiatan di luar, bukan digunakan untuk internal. Terbukti ada penyalahgunaan dana, maka ada sanksi administratif yang diberikan kepada Garuda Indonesia. Karena ini bukan ranah hukum, tapi hanya ke administrasi karena bukan penggelapan. Lebih ke pertanggungjawaban, diberikan ke orang yang tidak tepat. Mengakibatkan penilaian CSR buruk terhadap PT Garuda Indonesia (Persero).

Menurut Yosy Arisandy, (2015) di dalam sudut pandang Islam, manajemen laba memiliki dua sudut pandang. Pertama, jika manajemen laba dilakukan bukan atas dasar niat jahat, penipuan, mengambil keuntungan haram, memperkaya diri sendiri, dan tidak menyimpang dari Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) maka praktik manajemen laba dianggap bukan kategori *fraud* (kecurangan). Kedua, sebaliknya jika manajemen laba dilakukan atas dasar niat jahat, penipuan, mengambil keuntungan haram, memperkaya diri sendiri dan menyimpang dari PABU, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai *fraud* (kecurangan) dan melanggar hukum dan atau jika laporan keuangan yang disajikan ditujukan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan dan mengabaikan PABU.

Dalam Al-Quran QS. An-Nisa' [4]: 29 yang menjelaskan tentang mengenai larangan mengambil keuntungan dengan jalan menipu. Karena

Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk kembali menguji pengaruh *tax planning*, keputusan investasi, ukuran perusahaan dan CSR karena keempat variabel diatas dapat membantu manajer dalam mengoptimalkan laba. Sehingga peneliti dapat membantu untuk menguji apakah variabel tersebut dapat berpengaruh secara signifikan terhadap laba perusahaan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun dan variabel penelitian. Peneliti menggunakan periode waktu selama 4 tahun (2019-2022), dan variabel penelitiannya menjadi empat yaitu *tax planning*, keputusan investasi, ukuran perusahaan dan CSR. Sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan dua variabel saja yaitu *tax planning* dan CSR saja.

Alasan dipilihnya perusahaan sub sektor transportasi sebagai objek penelitian ini dikarenakan transportasi merupakan sarana yang sering digunakan bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya. Dalam hal ini perusahaan sub sektor transportasi juga harus memberikan kontribusi pajak yang seimbang kepada pemerintah. Menurut Menteri Perhubungan Budi

Karya Sumadi berpendapat bahwa sektor transportasi dan logistik berperan sebagai roda perekonomian nasional, menyediakan prasarana dan sarana demi terlaksananya kegiatan perekonomian serta kegiatan logistik produktivitas meningkat, karena sektor ini berfungsi menopang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun pernah ditemukan kasus tentang manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor transportasi, hal ini bisa mempengaruhi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh terjadinya manajemen laba di perusahaan BEI sub sektor transportasi. Di mana praktik manajemen laba ini masih sering dilakukan di dalam perusahaan untuk memberikan kesan laba yang baik. Praktik manajemen laba dalam penelitian ini bisa dideteksi dengan melihat *tax planning* atau perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Tingginya keputusan investasi juga bisa menjadi salah satu pendeteksi terjadinya tindakan manajemen laba. Selanjutnya, manajemen laba juga bisa terjadi pada perusahaan-perusahaan yang berskala besar.

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga saya tertarik melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Tax Planning*, Keputusan Investasi, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Subsektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *tax planning* berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2019-2022?
2. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2019-2022?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2019-2022?
4. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2019-2022?
5. Bagaimana pengaruh *tax planning*, keputusan investasi, ukuran perusahaan dan *corporate social responsibility* terhadap manajemen laba dalam sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui *tax planning* berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di bursa

efek Indonesia tahun 2019-2022.

2. Untuk mengetahui keputusan investasi berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2019-2022.
4. Untuk mengetahui *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2019-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh *tax planning*, keputusan investasi, ukuran perusahaan dan *corporate social responsibility* terhadap manajemen laba dalam sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagi penelitian, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang pengaruh *tax planning*, keputusan investasi dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2019-2022.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

masuk dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan manajemen laba

3. Bagi pihak lain, sebagai referensi informasi secara umum dan khususnya bagi mereka yang hendak melakukan penelitian yang sejenisnya.